



WORLD SOCIAL FORUM SEBAGAI PENGORGANISASIAN POLITIK *MULTITUDE*

Anggar Shandy

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia; Indonesia:
anggar.shandy@ui.ac.id

Abstract

This article provides an analysis of the resistance model and the proposals of World Social Forum (WSF). With Hardt and Negri's multitude as a theoretical framework, this article found that as a free and plural movement that serves as a non-state and non-partisan medium, WSF succeeded to stimulate democratic and reflective debates, submit proposals, share experiences, and form an alliance for movements and organisations who also seek to achieve a democratic and just world. This article also identifies the demands and proposals put forward by the WSF in line with a multitude political strategy: exodus, antagonistic reformism and taking power and achieving hegemony. These proposals are manifestation of the alternative vision to neoliberal globalization offered by the WSF.

Keywords: *globalization, multitude, neoliberalism, social movement, World Social Forum.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis model perlawanan serta tuntutan dan proposal *World Social Forum* (WSF). Dengan menggunakan konsep *multitude* dari Hardt dan Negri sebagai kerangka analisis, artikel ini menyimpulkan bahwa model perlawanan WSF yang berupa ruang terbuka, plural, serta bersifat non-negara dan non-partisan, mampu merangsang debat yang demokratis dan reflektif, pengajuan proposal, pertukaran pengalaman serta aliansi antar gerakan dan organisasi yang terlibat dalam tindakan konkret menuju solidaritas dunia yang demokratis dan adil. Artikel ini juga mengidentifikasi tuntutan dan proposal yang diajukan oleh WSF selaras dengan strategi politik *multitude* yang berupa eksodus, reformisme antagonistik dan perebutan kekuasaan dan hegemoni. Proposal-proposal tersebut merupakan manifestasi dari imaji alternatif terhadap globalisasi neoliberal yang ditawarkan oleh WSF.

Kata Kunci: gerakan sosial, globalisasi, *multitude*, neoliberalisme, *World Social Forum*.

Pendahuluan

Pada periode 1980an, Perdana Menteri Inggris saat itu, Margaret Thatcher, memperkenalkan slogan “tidak ada alternatif” untuk menegaskan bahwa pasar bebas merupakan satu-satunya sistem yang dapat bekerja. Thatcher mempopulerkan slogan tersebut dalam rangka menjustifikasi ekspansi kapitalisme secara global melalui reformulasi ideologi *Bretton Woods* yang termanifestasi melalui *World Bank* dan *International Monetary Fund* (Smith, 2008). Beberapa tahun berselang, seakan meneguhkan klaim tersebut dan disertai dengan runtuhnya Uni Soviet, filsuf kebangsaan Amerika Serikat, Francis Fukuyama memproklamirkan akhir sejarah dan akhir evolusi sosial-budaya umat manusia yang ditandai dengan kemenangan sistem demokrasi liberal (Fukuyama, 1992).

Periode 1980 dimulai dengan upaya menciptakan satu kesatuan tatanan ekonomi global melalui liberalisasi ekonomi dengan menciptakan rezim neoliberal. Sejak saat itu, terjadi perkembangan yang signifikan terkait globalisasi ekonomi, yakni internasionalisasi perdagangan dan keuangan, meningkatnya kekuatan korporasi multinasional serta meningkatnya peran institusi-institusi ekonomi internasional seperti *International Monetary Fund*, *World Bank*, dan *World Trade Organization* (Steger, 2013).

Namun pemandangan kontras terjadi pada semenjak akhir periode 1990. Protes terhadap institusi-institusi internasional yang dianggap sebagai garda depan pendorong ideologi neoliberal mulai merebak. Dari Seattle hingga Doha, dari Cancun hingga Quebec, perlawanan terhadap globalisasi neoliberal semakin lantang disuarakan. Puncaknya, pada 2001, puluhan ribu orang dari berbagai penjuru dunia dan berbagai latar belakang identitas berkumpul di Porto Alegre, Brasil yang diwadahi suatu forum bernama *World Social Forum* (WSF) dengan slogan “dunia yang lain itu memungkinkan!”. WSF merupakan suatu forum yang ditujukan untuk para aktivis ‘anti-globalisasi’ guna berbagi strategi dan menawarkan usaha untuk menciptakan suatu masa depan alternatif atas globalisasi neoliberal. Sebagai ruang terbuka, plural, serta bersifat non-negara dan non-partisan, WSF berupaya merangsang debat yang demokratis dan reflektif, pengajuan proposal, pertukaran pengalaman serta aliansi antar gerakan dan organisasi yang terlibat dalam tindakan konkret menuju solidaritas dunia yang demokratis dan adil. Suatu upaya untuk menciptakan ruang permanen dan proses untuk membangun alternatif terhadap globalisasi neoliberal.

WSF menjadi corong utama gerakan anti-globalisasi yang telah merebak sejak dekade 1970an di berbagai penjuru dunia. Jika dilihat dari model pengorganisasian, WSF lahir sebagai

suatu terobosan besar di dalam tubuh gerakan anti-globalisasi. Beragam gerakan perlawanan terhadap globalisasi neoliberal dipertemukan dan dihubungkan melalui debat dan diskusi yang reflektif. Model pengorganisasian WSF menawarkan suatu kebaruan dalam hal struktur jejaringnya yang horizontal alih-alih bentuk pengorganisasian yang bersifat hirarkis. Selama ini, penelitian terkait WSF melihatnya sebagai ruang publik global (Conway & Singh, 2009) (Doerr, 2008), jejaring gerakan sosial global (Byrd & Jasny, 2010), ruang utopia (Tormey, 2005), embrio partai internasional (Patomaki, 2011), ruang intensionalitas (Juris, 2008) dan ruang bertemunya beragam aliansi dan aktor politik (Conway, 2011).

Sebagaimana disebutkan dalam kajian-kajian sebelumnya, pembahasan mengenai WSF seringkali mengerucut pada pertanyaan mengenai hakikat dari WSF, apakah sebagai arena atau sebagai aktor (Teivainen, 2005). Dengan menggunakan kerangka konseptual *multitude* dari Hardt dan Negri (2000) (2004) (2009) (2017), artikel ini berupaya menjembatani perdebatan antara arena dan aktor tersebut dengan melihat WSF sebagai bentuk pengorganisasian politik *multitude*. Selain itu, artikel ini tidak hanya berupaya untuk mendeskripsikan bentuk perlawanan WSF tetapi juga menjelaskan konteks kemunculan dan dinamika serta stagnansi dari proses yang berlangsung di dalam WSF. Upaya mendeskripsikan model perlawanan WSF sebagai bentuk pengorganisasian politik *multitude* dilihat dari keberagaman aktor yang terlibat di dalam WSF dan pola interaksi antar aktor di dalam WSF. Sementara stagnansi proses yang berlangsung di dalam WSF dijelaskan menggunakan tiga tahapan strategi politik *multitude*.

Politik *Multitude*

Hardt dan Negri (2000) melihat bahwa globalisasi bukanlah suatu narasi yang tunggal dan utuh. Di satu sisi, globalisasi berperan dalam menciptakan seperangkat logika dan struktur aturan yang mengatur dan mendominasi dunia (*empire*). Namun di sisi lain, globalisasi juga akan mendorong untuk terciptanya daya kreatif yang berperan sebagai kekuatan yang akan menciptakan suatu organisasi politik alternatif yang akan melawan dominasi tersebut (*multitude*) (Hardt & Negri, 2000). Globalisasi berperan dalam menciptakan arena baru kooperasi dan kolaborasi yang melintasi batas negara dan benua yang memungkinkan untuk terciptanya jejaring yang memungkinkan segala perbedaan dapat diekspresikan secara bebas dan setara yang pada akhirnya memungkinkan terciptanya suatu perlawanan terhadap *empire*.

Selain itu, globalisasi yang mengakibatkan transformasi *power* juga berimplikasi terhadap perubahan dalam memahami subjek politik dalam struktur global. Identitas subjek politik dalam struktur global kontemporer menjadi sangat cair, terfragmentasi dan tidak lagi memiliki fondasi yang kuat. Subjek politik inilah yang oleh Hardt dan Negri disebut sebagai *multitude* (Hardt & Negri, 2004). Sebagai subjek politik emansipasi, *multitude* akan terus terlibat dalam proses dialektis dan berhadapan-hadapan melawan tatanan global yang saat ini mendominasi –empire.

Multitude merupakan konsep pengorganisasian politik yang tercipta berkat keberagaman gerakan dalam berbagai sektor. *Multitude* sebagai keberagaman kekuatan antagonistik, menggempur struktur global saat ini dari berbagai arah. *Multitude* merupakan antagonisme karena *multitude* adalah limit dari kekuasaan (*empire*) itu sendiri. Cara berpikir ini mirip dengan antagonisme yang diajukan oleh Laclau dan Mouffe (2011), bedanya Hardt dan Negri melihat bahwa keberagaman kekuatan antagonistik tidak harus disatukan dalam satu kerangka kekuatan hegemoni. *Multitude* bersifat *biopolitics*, dalam artian dimensi perlawanannya yang mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, serta kultural secara bersamaan, serta upayanya dalam menciptakan ruang publik dan bentuk pengorganisasian politik yang baru (Hardt & Negri, 2000).

Sebagai subjek politik, *multitude* lahir sebagai dampak dari komposisi teknis kapital, yang mencakup semua orang yang tenaga kerjanya secara langsung maupun tidak langsung dieksploitasi dan tunduk terhadap moda produksi dan reproduksi kapitalis (Hardt & Negri, 2000). Namun, sebagai suatu proyek politik, agensi *multitude* hanya dapat hadir melalui perjuangan kolektif (Hardt, 2005), dalam suatu aksi bersama, dan dalam perlawanan global terhadap empire (Hardt & Negri, 2004). *Multitude* merupakan bentuk pengorganisasian politik yang di satu sisi menekankan pada keberagaman dalam perlawanannya dan di sisi lain mengoordinasi aksi bersama dan mempertahankan kesetaraan di dalam struktur organisasi yang horizontal (Hardt & Negri, 2009). Perjuangan *multitude* merupakan perjuangan atas demokrasi yang menjadikan demokrasi sebagai tujuan sekaligus cara (Hardt & Negri, 2004).

Lebih jauh, Hardt dan Negri memaparkan tiga strategi perlawanan *multitude* (Hardt & Negri, 2017). Strategi pertama merupakan eksodus. Yang dimaksud dengan eksodus adalah upaya penarikan diri dari relasi dengan kapital melalui proses aktualisasi potensi otonomi atau penciptaan institusi baru yang didasarkan pada relasi sosial baru yang melampaui dikotomi privat-publik. Strategi kedua merupakan reformisme antagonistik. Yang dimaksud dengan reformisme antagonistik adalah strategi untuk melibatkan diri dalam lembaga politik yang sudah ada dan

mengubahnya dari dalam. Sementara strategi ketiga ialah perebutan hegemoni. Strategi merebut kekuasaan dan hegemoni mensyaratkan transformasi masyarakat secara langsung dan menyeluruh, yang berarti skalanya bersifat global.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan permasalahan yang telah diajukan. Artikel ini menganalisis topik berdasarkan informasi dan data yang didapat menggunakan teori yang telah dipaparkan pada bagian landasan konseptual. Artikel ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Data primer dalam artikel ini bersumber dari *Charter of Principles* dan proposal-proposal yang diajukan oleh para partisipan selama proses *World Social Forum*. Sementara data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, laman web, rilis pers maupun laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik: bagaimana aktor-aktor maupun para komentator WSF memahami realitas, bagaimana gerakan WSF, apa semangat dan tujuan WSF, serta strategi apa yang dilakukan WSF terkait upaya dalam memberikan alternatif terhadap globalisasi neoliberal.

Globalisasi Neoliberal dan Konteks Kelahiran *World Social Forum*

Secara tersurat, sebagaimana yang tercatat dalam *Charter of Principles*, WSF merupakan oposisi terhadap proses globalisasi yang dikomandoi oleh perusahaan multinasional, pemerintah dan institusi internasional dalam rangka memenuhi kepentingan korporasi (World Social Forum, 2015). Awal mula dari proses globalisasi neoliberal tersebut dapat dilacak ke belakang di seputar peristiwa 1968. Peristiwa 1968 menjadi penanda awal perubahan komposisi kelas yang terjadi di dalam tubuh kapitalisme global (Hardt & Negri, 1994). Perubahan komposisi kelas inilah yang kemudian direspon oleh kapital dan diakselerasikan menjadi apa yang kita kenal hari ini dengan globalisasi neoliberal.

Tak berselang lama pasca 1968, relasi baru antara kapital dan *labor* lahir. Era baru hubungan sosial antara kapital dan *labor* ini didahului oleh fase panjang perjuangan sosial yang terjadi di sekitar peristiwa 1968. Era baru ini ditandai dengan setidaknya empat faktor: 1) lahirnya individualisme dan perencanaan ekonomi yang dikembalikan ke mekanisme pasar, 2) model

regulasi yang melampaui batas-batas negara-bangsa, 3) otomatisasi kerja dan komputerisasi masyarakat dan 4) kerja-kerja cenderung bersifat abstrak, imaterial dan intelektual yang mengakibatkan perubahan komposisi *labor-power* (Hardt & Negri, 1994: 272). Dalam tataran kebijakan, perubahan komposisi kelas ini mendorong dilakukannya restrukturisasi ekonomi global yang dimulai pada periode 1980, yang menandai akhir dari era Keynesian dan digantikan dengan tampilnya ideologi neoliberal (Smith, 2007: 5). Sejak saat itu, terjadi perkembangan yang signifikan terkait globalisasi ekonomi yang berupa internasionalisasi perdagangan dan keuangan, meningkatnya kekuatan korporasi multinasional serta meningkatnya peran institusi-institusi ekonomi internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), World Bank, dan *World Trade Organization* (WTO) (Steger, 2013: 41).

Skemanya restrukturisasi ekonomi global tersebut berupa: World Bank dan IMF memberikan bantuan modal bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan perekonomiannya dengan syarat melakukan restrukturisasi neoliberal pada perekonomiannya, atau yang sering disebut dengan *Structural Adjustment Program* (SAP). Untuk memperlancar agenda tersebut, *World Bank* dan IMF mengeluarkan serangkaian kebijakan neoliberal bagi negara-negara berkembang yang masih terjerat utang dan krisis ekonomi atau yang sering disebut dengan *Washington Consensus*. Tujuan dari *Washington Consensus* tersebut adalah untuk mereformasi perekonomian negara-negara berkembang sehingga mereka akan berada dalam posisi yang dianggap lebih baik untuk membayar utang mereka. *Washington Consensus* berisi sepuluh kebijakan ekonomi neoliberal, diantaranya: 1) disiplin anggaran pemerintah, 2) penataan kembali prioritas pengeluaran publik, 3) reformasi pajak, 4) liberalisasi suku bunga, 5) nilai tukar yang kompetitif, 6) liberalisasi pasar, 7) memperbolehkan investasi asing, 8) privatisasi BUMN, 9) deregulasi, dan 10) hak kepemilikan properti (Williamson, 2002). Hal ini disebut-sebut sebagai suatu keniscayaan demi menyelamatkan perekonomian global. Realisasi program *Washington Consensus* memiliki konsekuensi logis berupa minimalisasi campur tangan negara dalam ekonomi.

Harvey menyebut bahwa pergeseran paradigma ekonomi global, dari Keynesianisme/*embedded-liberalism* ke neoliberalisme dapat terjadi dan dikukuhkan melalui mekanisme koersi maupun mekanisme ideologis/kultural (Harvey, 2005: 40-41). Mekanisme koersi –baik melalui militer seperti pengalaman Chile maupun finansial seperti operasi IMF di Mozambik- berhasil memproduksi penerimaan atas paradigma ekonomi pasar bebas yang

fatalistik; keyakinan bahwa tidak ada sistem alternatif lain yang dapat menandinginya. Sementara melalui mekanisme ideologis/kultural, neoliberalisme disebarkan melalui media, institusi-institusi masyarakat sipil serta pengalaman keseharian hidup di dalam sistem tersebut. Hal ini yang kemudian menjadikan neoliberalisme sebagai *common sense* dan memberikan pemahaman bahwa neoliberalisme merupakan suatu hal yang dibutuhkan, bahkan natural.

Sementara itu, globalisasi sebagai konsekuensi dari perluasan sirkuit pasar bebas memiliki dampak yang ambivalen. Di satu sisi, globalisasi neoliberal melahirkan musuh bersama bagi gerakan-gerakan perlawanan. Namun di sisi lain globalisasi neoliberal juga menyediakan *common world* bagi gerakan-gerakan perlawanan untuk berkolaborasi dan berkooperasi. Dari sini, globalisasi dapat diidentifikasi sebagai *the common*; praktik-praktik sosial yang kita ciptakan bersama serta moda-moda sosial yang mendefinisikan relasi antar manusia (Hardt & Negri, 2009: 139). Dari *the common* inilah suatu subjek emansipasi baru akan lahir yang akan berupaya menolak dan menyerang komando kapitalis serta mengeksplorasi perbedaan-perbedaan singular *multitude* sebagai modal untuk menciptakan institusi-institusi otonom yang memadai. Kekuatan-kekuatan produktif yang gagal direngkuh sepenuhnya oleh kapital ini mewujud dalam gerakan-gerakan perlawanan yang menjadi embrio bagi WSF.

WSF dan proses yang mengiringinya lahir berkat berbagai mobilisasi dan protes terhadap implementasi kebijakan neoliberal yang mulai dikonsolidasikan sejak periode 1970 di negara-negara Selatan. Sejak saat itu, strategi pertumbuhan ekonomi mendasarkan diri pada mekanisme pasar yang didorong oleh pendekatan privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi (Harvey, 2007: 3). Kebijakan-kebijakan neoliberal mendorong perluasan cakupan komodifikasi kapital dan logika akumulasi, yang tak hanya terbatas pada bidang ekonomi, tetapi juga menerabas bidang-bidang kultural, ekologi dan sosial.

Transformasi ekonomi global melahirkan perubahan relasi antara kapital dan *labor* yang pada akhirnya mengubah komposisi gerakan perlawanan dan gerakan sosial, baik dalam tataran praktik maupun strategi (Funke, 2012). Dinamika ini tak hanya memfragmentasi, tetapi pada saat bersamaan juga memperluas dan memperdalam kolektivitas aktor-aktor yang berupaya melawan kapitalisme neoliberal. Yang menjadi fokus utama dari gerakan-gerakan ini tak lagi hanya eksploitasi yang terjadi terhadap kelas pekerja, tetapi juga menyoal operasi struktural terhadap gender, ras, dan orientasi seksual. Untuk itu, kelas dikonseptualisasi ulang dengan memasukkan pengalaman-pengalaman dan subjektivitas-subjektivitas sosial lain yang merupakan cerminan dari

konflik antara kapital dan *labor* (Lorenzano, 2000: 126-158). Subyek inilah yang diidentifikasi sebagai *multitude* di mana subjek emansipasi tidak lagi terbatas pada kelas pekerja melainkan siapapun yang bekerja di bawah komando kapital.

Selain konsekuensi struktural dari transformasi ekonomi global, sejarah pengorganisasian gerakan kiri itu sendiri juga melahirkan suatu kebutuhan akan proses dan pendekatan baru di antara aktor-aktor yang semakin heterogen dan terfragmentasi. Terlebih, kegagalan proyek negara sosialis melahirkan kesangsian dan kehati-hatian di tubuh gerakan kiri terhadap kelompok manapun yang mengklaim dirinya sebagai *vanguard* (Fisher & Ponniah, 2015: 13). Di sisi lain, gerakan-gerakan ini menyadari perlunya pengartikulasian visi bersama. Dari sana, memungkinkan lahirnya konfigurasi yang tidak hanya berupaya mempertahankan keberagaman dan otonomi masing-masing kelompok tetapi di saat bersamaan juga menjembatani dan mengoordinir gerakan-gerakan perlawanan ke dalam suatu formasi baru. Karakter dan model pengorganisasian politik yang baru inilah yang pada akhirnya memengaruhi gerakan globalisasi alternatif dan WSF (Leite, 2005: 41).

Model Pengorganisasian Politik *World Social Forum*

Secara garis besar, penyelenggaraan WSF terbagi ke dalam dua acara besar: 1) acara-acara inti yang dirancang oleh *Organizing Committee* (OC) yang berupa panel-panel, konferensi-konferensi, dan testimoni, serta 2) acara-acara yang diorganisir secara mandiri oleh para partisipan yang berupa seminar-seminar dan lokakarya yang bekerja layaknya titik kumpul (*assembly*) untuk para partisipan saling berinteraksi, berjejaring, membentuk koalisi, bertukar pengalaman dan menyusun strategi bersama. Proposal untuk lokakarya-lokakarya mandiri ini diajukan oleh para partisipan dan disetujui oleh OC. Kedua struktur acara besar tersebut diselenggarakan dalam suatu kerangka yang disebut dengan *open space*. Model *open space* menyediakan ruang bagi berbagai aktor dan gerakan sosial dari seluruh dunia untuk berkumpul bersama-sama dalam dialog terbuka, jejaring yang saling mendukung dan pembangunan aliansi dalam suatu struktur pengorganisasian yang horizontal dan tetap mempertahankan keberagaman aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Bentuk pengorganisasian politik WSF berasal dari praktik gerakan-gerakan perlawanan sebelumnya yang bersifat horizontal, non-hirarki dan berusaha menghindari dominasi satu aktor terhadap aktor yang lain serta berupaya tetap menghargai keberbedaan antar aktor yang terlibat.

Paradigma *open space* merupakan upaya yang coba dipertahankan oleh penyelenggara WSF agar WSF bisa seinklusif mungkin –untuk menciptakan ruang material maupun virtual bagi kelompok masyarakat sipil dan gerakan sosial yang berupaya menentang globalisasi neoliberal untuk saling bersosialisasi, mendiskusikan proposal mereka masing-masing, memperdebatkan model ekonomi dan politik alternatif serta mengembangkan aksi langsung (*direct action*) yang terdesentralisasi dan jejaring advokasi. Proses *open space* ini mencerminkan hasrat gerakan perlawanan untuk menciptakan ruang bebas bagi berkembangnya moda alternatif globalisasi. Berdasarkan logika ini, WSF merupakan suatu entitas non-partai dan non-deliberatif, yang mana para penyelenggaranya berupaya mempertahankannya dari kooptasi partai politik, negara dan korporasi. Dari sana, keberagaman ideologi para partisipan dapat berperan sebagai penghalang terciptanya suatu bentuk organisasi yang hirarkis dan bersifat memaksa namun tetap dapat berfungsi sebagai entitas yang berorientasi pada aksi (*action-oriented*). Pada akhirnya, WSF berfungsi sebagai ruang bagi gerakan-gerakan perlawanan tersebut untuk berjejaring melawan struktur kuasa yang tunggal pada level politik global.

Pada tahun pertamanya, WSF hanya berfokus sebagai forum tandingan bagi World Economic Forum (WEF). Bahkan pada tahun-tahun pertamanya, penyelenggaraan WSF secara disengaja digelar tepat bersamaan dengan penyelenggaraan WEF (Patomaki & Teivainen, 2002: 12). Namun tak berselang lama sejak WSF tahun 2001 dan setelah dilakukan evaluasi, Charter of Principles disusun oleh OC pada April 2001 dan disetujui oleh *International Council* (IC) pada Juni 2001. Charter of Principles ini menjadi penting karena dari sana dapat dilihat pergeseran dari WSF yang awalnya mengidentifikasi diri hanya sebagai forum tandingan atas WEF menjadi forum yang menentang neoliberalisme, menentang dominasi kapital atas dunia dan segala bentuk imperialisme (World Social Forum, 2015). Selain perubahan terhadap apa yang diidentifikasi sebagai lawannya, Charter of Principles juga membakukan struktur organisasi WSF yang non-hirarkis, horizontal, dan partisipatif yang tetap menekankan pada otonomi dari tiap-tiap aktor yang terlibat.

Dalam *Charter of Principles*, secara eksplisit disebutkan bahwa WSF berfokus pada pertukaran dan penyebaran ide dan taktik di antara aktor-aktor yang berupaya menentang globalisasi neoliberal (World Social Forum, 2015). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dipromosikan model pengorganisasian yang anti-hirarkis: yang bersifat horizontal, otonom dan swakelola. Sebagai ruang untuk berbagai gerakan sosial dan aktor yang terlibat dalam upaya

menentang globalisasi neoliberal, WSF mendorong aktor-aktor yang terlibat untuk menemukan kesamaan (*commonality*) dalam keberbedaan mereka serta mencari strategi dan taktik yang beragam untuk akhirnya membangun jejaring perlawanan terhadap globalisasi neoliberal yang lebih besar lagi (Smith, 2008: 213). Proses tersebut menghasilkan metode yang inovatif untuk gerakan masyarakat sipil saling terlibat dalam kolaborasi yang lebih inklusif dan demokratis, serta lebih mengintegrasikan perjuangan mereka.

Wallerstein mengidentifikasi beberapa karakteristik khas dari WSF, di antaranya: pertama, WSF berusaha untuk menyatukan semua elemen yang berupaya melawan globalisasi neoliberal dengan partisipasi sebagai tujuan bersama dan tetap menghargai prioritas dan otonomi antar elemen (Wallerstein, 2002). Serta yang lebih penting, WSF berupaya untuk menyatukan gerakan-gerakan sosial dari negara-negara Utara dan Selatan dalam satu ‘kerangka tunggal’. Dari kerangka tunggal tersebutlah, debat dan ketegangan lahir terkait identitas dan strategi WSF –debat antara WSF sebagai ruang versus sebagai gerakan, dan sifatnya horizontal versus vertikal. Hal tersebut menjadi hal yang lumrah mengingat multitude bukan hanya ruang untuk menemukan kesamaan (*commonality*), tetapi juga ruang konflik (Hardt, 2005).

Tiga tahun pertama penyelenggaraan WSF, ketegangan antara gerakan-gerakan sosial dan organisasi-organisasi yang tergabung baik di IC maupun OC WSF semakin memuncak. Ditambah lagi, keterlibatan Partido dos Trabalhadores (PT) dan pidato yang disampaikan Lula Da Silva yang dihadiri lebih dari 75.000 orang memicu perdebatan. Beberapa gerakan sosial akar rumput menganggap bahwa WSF telah dibajak oleh partai politik dan politisi. Seperti yang dirangkum Naomi Klein, bahwa pembajakan terhadap WFS oleh partai politik dan politisi merupakan bukti bahwa gerakan perlawanan terhadap globalisasi pada akhirnya semakin mendewasa dan lebih serius (Klein, *The Hijacking of The WSF*, 2003). Selain itu, *Confectioners without Borders* merespon pidato Lula tersebut dengan menyatakan bahwa Lula tidak merepresentasikan gerakan dan bahwa orang-orang yang berada di jalanan lah yang merepresentasikan gerakan ini (Gautney, 2010: 58). Hal ini menunjukkan bahwa di tengah krisis yang melanda demokrasi representatif, proyek politik multitude adalah upaya untuk merebut kembali konsep demokrasi dan menggantikannya dengan demokrasi absolut di mana kekuasaan berada di tangan semua orang, bukan pada mekanisme representatif (Hardt & Negri, 2004: 307).

Pada tiga tahun pertama penyelenggaraannya, corak *top-down* masih sangat lekat dengan WSF. Intelektual-intelektual kenamaan masih memonopoli penyelenggaraan WSF pada tiga tahun

pertama ini. Namun, hal tersebut bukan tanpa alasan. Intelektual-intelektual yang dianggap memiliki kecakapan dalam analisis terhadap globalisasi dan jejaring internasional yang dimilikinya berperan banyak dalam menghubungkan fragmen-fragmen di dalam gerakan anti-globalisasi neoliberal (Houtart & Polet, 2001). Bahkan secara organisasional, pada tahun-tahun ini IC masih menggelar pertemuannya secara tertutup sehingga mustahil untuk mengetahui bagaimana suatu keputusan mengenai WSF diambil atau bahkan untuk mempertanyakan keputusan tersebut (Klein, 2002: 204).

Berkaca dari tiga tahun penyelenggaraan WSF yang dinilai kurang demokratis dan partisipatoris, penyelenggaraan WSF antara tahun 2003 hingga 2005 melahirkan dinamika terkait pilihan bentuk pengorganisasian WSF. Kritik dari para partisipan mendorong untuk dilakukannya beberapa inovasi organisasional. Pada periode tersebut, WSF mengalami perkembangan yang substansial, dari pertemuan yang diorganisir oleh OC dan IC menjadi pertemuan yang diorganisasi secara mandiri oleh para partisipan (*self-organized*). Pergeseran ke bentuk forum yang lebih horizontal ini dimaksudkan untuk mempertahankan legitimasi dan komitmen WSF terhadap prinsip-prinsip solidaritas dan perlawanan terhadap segala bentuk sistem opresi. Kemudian model dan logika pengorganisasian ini dijadikan sebagai kerangka bagi WSF Polisentris tahun 2006 dan aksi kolektif yang diinisiasi oleh partisipan WSF atau yang disebut dengan *A Global Call for Action* yang menjadi pengganti WSF tahun 2008. Dari sini, horizontalisme sebagai bentuk pengorganisasian politik makin menguat di dalam tubuh WSF.

Selain perubahan organisasional, WSF tahun 2005 juga menandai pergeseran dalam hal metodologi yang bermuara pada perubahan mekanisme pengambilan keputusan WSF. Lima tahun pertama WSF, secara formal, otoritas yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan berada di tangan OC yang terdiri dari Central Trade Union, Movement of Landless Rural Workers dan enam organisasi gerakan sosial dari Brazil. Namun dinamika yang terjadi pada WSF dari tahun 2003 hingga 2005 memberikan banyak otokritik terhadap WSF di antaranya terkait transparansi dan demokrasi, repetisi dialog dan disparitas kekuasaan antara organisasi-organisasi besar dan gerakan-gerakan sosial. Diskusi yang dimulai pasca evaluasi WSF tahun 2003 tersebut berupaya mencari metodologi baru untuk lebih mendemokratiskan dan lebih mensistematisasikan WSF. Metode baru ini mulai dipromosikan pada WSF tahun 2005. Metodologi yang disebut dengan *Thematic Consultation and Cohesion of Activities* ini bertujuan untuk: 1) memastikan bahwa seluruh program WSF sifatnya *bottom-up* dan tiap aktivitasnya bersifat swakelola dan 2)

memaksimalkan kemungkinan untuk para partisipan bisa terlibat dalam suatu aksi bersama (Santos, 2006: 77). Praktik dari metodologi baru ini adalah penentuan tema dari lokakarya melalui konsultasi terbuka dan partisipatif yang diikuti 1863 organisasi yang mengajukan rancangan tema mereka melalui situs web (Santos, 2006: 78).

Selain perubahan organisasional dan metodologi, WSF tahun 2005 memberikan satu langkah maju bagi gerakan ini yang berupa penyusunan manifesto oleh sembilan belas aktivis dan intelektual yang disebut dengan Porto Alegre Consensus. Manifesto tersebut berisi dua belas poin yang selama ini menjadi tema besar dari WSF. Namun hal tersebut tak lepas dari perdebatan. Beberapa kelompok menyebut penyusunan manifesto tersebut telah mencederai semangat dari *Charter of Principles* yang menyebut bahwa tak ada satu pun otoritas yang berhak berbicara atas nama WSF secara keseluruhan. Selaian itu perdebatan juga mengemuka terkait proses penyusunan manifesto tersebut hanya dilakukan oleh sembilan belas orang, baru kemudian diserahkan kepada seluruh partisipan untuk disetujui atau tidak. Namun di luar perdebatan mengenai penyusunan dari manifesto tersebut yang dianggap kurang demokratis dan mencederai semangat dari *Charter of Principles*, jika dilihat dari substansinya, dua belas poin yang tertuang di dalam manifesto tersebut hanyalah rangkuman dari aspirasi-aspirasi yang mengemuka selama proses WSF.

Tahun 2005 merupakan penanda yang signifikan terkait bentuk pengorganisasian politik WSF. Dalam periode ini, dinamika yang terjadi pada proses WSF mampu memberikan jawaban atas problem kepemimpinan (*leadership*) yang dihadapi gerakan sosial dewasa ini. Problem kepemimpinan lahir akibat tegangan antara cita-cita untuk melahirkan proses demokrasi yang ideal dan melahirkan suatu institusi yang mampu melakukan transformasi secara langgeng, atau dengan kata lain problem ini muncul akibat adanya pembagian peran antara strategi dan taktik (Hardt & Negri, 2017: 3). Strategi mesyaratkan perencanaan jangka panjang atas gerakan dan memastikan keberlanjutan gerakan. Sementara taktik terbatas pada perencanaan jangka pendek. Dalam kasus WSF, sebelum tahun 2005, peran penyusunan strategi berada di tangan IC di mana IC menentukan hampir seluruh rencana penyelenggaraan WSF dan partisipan hanya mengikuti dan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh IC. Namun sejak tahun 2005, dilakuakn pembalikan terhadap pembagian peran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari WSF yang semakin diorganisasi secara mandiri oleh para partisipan (*self-organized*) dan tema yang diangkat merupakan usulan dari partisipan. Sedangkan peran IC menjadi terbatas, hanya sebatas memastikan terselenggaranya

WSF. Hal ini senada dengan apa yang diajukan Hardt Negri ketika berbicara pembalikan peran strategi dan taktik, di mana strategi harus dikembalikan ke multitude (Hardt & Negri, 2017: 22).

Pasca 2005, perlawanan terhadap residu avant-guardisme menjadi semacam tegangan yang permanen di dalam tubuh WSF (Glasius & Timms, 2006: 190-238). Proses *cross-fertilisation* antara para penyelenggara WSF dan aktivis yang berupaya mempromosikan pengorganisasian yang terbuka, horizontal dan demokratis semakin menghebat (Della-Porta, 2005: 175-201). Upaya untuk mencari jalan tengah antara menciptakan suatu gerakan yang demokratis dan menciptakan gerakan yang efisien selalu mengemuka dalam tiap penyelenggaraan WSF. Corak forum yang pada tahun-tahun awal sangat didominasi dengan ceramah para intelektual kenamaan makin digerus dan digantikan dengan penyelenggaraan panel-panel tematik yang diorganisir oleh jejaring aktivis akar rumput (Pleyers, 2012: 166-183). Hal tersebutlah yang kemudian menjadi motor penggerak WSF dan forum-forum regional lain pada penyelenggaraannya akhir-akhir ini.

Komposisi dan Tegangan di dalam *World Social Forum*

Di dalam tubuh WSF, setidaknya terdapat tiga kelompok yang paling menonjol terkait perdebatan mengenai bentuk pengorganisasian politik WSF. Ketiga kelompok tersebut di antaranya: organisasi-organisasi non-pemerintahan, kelompok anti-hirarki dan partai politik. Masing-masing kelompok memiliki sejarah politik, visi dan ideologi yang berbeda yang pada akhirnya berpengaruh terhadap seperangkat repertoar aksi gerakan sosial hari ini dan WSF secara khusus. Namun, ketiga aktor yang memiliki visi yang beragam dan sering bertentangan tersebut tetap dapat diakomodir berkat bentuk pengorganisasian politik WSF yang inklusif dan menekankan pada struktur yang horizontal. Ketiga aktor di dalam WSF tersebut juga dapat diidentifikasi sebagai cerminan dari multitude sebab pada akhirnya, keberagaman visinya tidak tereduksi ke dalam satu identitas yang tunggal (Hardt & Negri, 2004: 99). Selain itu, kolaborasi dan interaksi antar aktor yang beragam tersebut kemudian mendorong proses transformasi yang akan menghasilkan sesuatu yang terus menerus berubah, baik dalam hal bentuk pengorganisasian maupun imaji alternatif WSF.

Organisasi Non-Pemerintah

Organisasi non-pemerintah (NGO) memainkan peran penting dalam proses perkembangan WSF. NGO berkontribusi signifikan khususnya dalam hal sumber daya finansial dan sumber daya manusia sejak pertama kali penyelenggaraan WSF. IC dan OC WSF sebagian besar diisi oleh NGO dan koalisi NGO (Waterman, 2003). Selain itu, sumber pendanaan dari WSF sebagian besar didukung oleh NGO-NGO seperti *ActionAid*, *Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement*, *Save the Children*, *the Catholic Fund for Overseas Development*, *Oxfam*, *Novib*, dan *the Interchurch Organization for Development Cooperation*. Organisasi-organisasi filantropi seperti *Ford*, *Rockefeller Brothers*, dan *H. Boll Foundations* juga turut mendukung secara finansial penyelenggaraan WSF, kecuali pada WSF tahun 2004 di India. Pada WSF tahun 2004, OC India menolak pendanaan dari *Ford* karena organisasi tersebut dianggap mendukung Revolusi Hijau yang terjadi di India pada periode 1960-1970 yang menjadi dasar bagi kebijakan neoliberal di India (Jordan, 2004).

NGO yang berpartisipasi dalam WSF bekerja sesuai asumsi dan fungsi yang berbeda dengan aktor politik lain. Misalnya mengenai perdebatan terkait masalah kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata, NGO cenderung menganggap bahwa negara, NGO dan pelaku pasar mampu menjadi aktor yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Sebagian besar NGO yang merepresentasikan ide-ide liberal bahkan cenderung menolak orientasi anti-neoliberal yang menjadi nyawa dari WSF. Sementara NGO dengan ideologi yang cenderung progresif menawarkan suatu konsep alternatif bagi WSF, di mana negara dan pelaku pasar didorong untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Secara umum, baik NGO dengan corak liberal maupun progresif masih berasumsi bahwa jalan keluar dan alternatif bagi globalisasi neoliberal adalah dengan memperkuat masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbang bagi pelaku pasar dan negara serta masih berupaya mendorong agenda-agenda negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal tersebut bertentangan dengan anggapan dari kelompok kiri yang berada di dalam WSF yang menganggap masyarakat sipil sebagai kepanjangan tangan dari negara dan globalisasi neoliberal. Pada WSF tahun 2002 misalnya, koalisi serikat pekerja Brazil menganggap NGO-NGO yang membawa agenda masyarakat sipil telah mengaburkan agenda-agenda pertentangan kelas yang notabene dianggap krusial untuk memahami mekanisme yang menjadi dasar bekerjanya kapitalisme global (Brazilian Trade Unionists, 2002). Selain itu, gerakan sosial otonom melihat bahwa NGO cenderung

merepresentasikan agenda politik moderat yang tak lain adalah upaya untuk mempertahankan posisi politik mereka. NGO dirasa hanya memosisikan WSF sebagai entitas yang bisa digunakan untuk memengaruhi kebijakan negara dan korporasi, namun bukan sebagai entitas yang dapat memberikan alternatif bagi kapitalisme itu sendiri.

Kelompok Anti-hirarki

Kelompok anti-hirarki terdiri dari beragam kelompok, mulai dari para anarkis, gerakan perempuan, otonomis dan horizontalis yang disatukan oleh kesamaan visi yang berupa upaya membangun suatu entitas baru yang partisipatif di luar sistem elektoral, negara dan politik konvensional. Beberapa dari kelompok ini, misalnya para anarkis dan otonomis secara terbuka memproklamkan “penghapusan negara”, sementara sebagian besar dari kelompok ini mencoba membangun dan menandingi bentuk-bentuk otoritas yang mereka anggap opresif. Kelompok ini berpartisipasi cukup aktif pada awal pembentukan WSF untuk membangun jejaring dengan kelompok lain, kemudian mereka membangun ruang otonom yang terpisah karena mereka enggan mengakui otoritas penyelenggara WSF.

Yang membedakan kelompok anti-hirarki dengan kelompok lain di dalam WSF adalah kelompok ini beranggapan bahwa perubahan hanya dapat diraih melalui aksi langsung (*direct action*) dan upaya membangun proyek-proyek kooperatif dan komunitas kultur-tandingan (*counter culture*) yang mengacu pada kondisi kehidupan sehari-hari (*everyday life*), bukan melalui partisipasi dalam proses elektoral. Karena pendekatan beberapa kelompok anti-hirarki yang cenderung konfrontatif, kehadiran kelompok ini melahirkan kontroversi karena dianggap justru telah menaikkan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnegara dalam protes-protes anti-neoliberalisme.

Kelompok anti-hirarki melihat bentuk pengorganisasian WSF yang berupa *open space* sebagai ruang untuk lahirnya kesamaan (*commons*). Bagi mereka, *open space* dianggap dapat memfasilitasi bentuk-bentuk relasi sosio-ekonomi alternatif, yang terlepas dari intervensi negara dan kapital. Salah satu kontribusi kelompok anti-hirarki di dalam WSF adalah dengan menjamurnya ruang-ruang otonom (*autonomous space*) tiap kali penyelenggaraan WSF. Misalnya dalam *International Youth Camp* WSF tahun 2002, kelompok ini mengadakan *Intergalactica Laboratory of Global Resistance* yang menyediakan forum partisipatif untuk gerakan-gerakan

sosial akar rumput. Ruang tersebut merupakan satu-satunya ruang di mana taktik aksi langsung (*direct action*) didiskusikan, termasuk protes terhadap penyelenggara WSF itu sendiri. Pada tahun tersebut, partisipan yang tergabung di Intergalactica menentang adanya ruangan VIP. Akibat intelektual-intelektual kenamaan dan melakukan aksi menduduki ruangan tersebut. Setelah insiden tersebut, ruangan VIP ditiadakan tiap kali penyelenggaraan WSF. Selain itu, ruang-ruang otonom yang berhasil diciptakan oleh kelompok anti-hirarki diantaranya: konferensi “*Life After Capitalism*” pada WSF tahun 2003 serta *Mumbai Resistance dan Peoples Movements Encounter II* pada WSF tahun 2004.

Kehadiran ruang-ruang otonom yang konsisten dalam setiap penyelenggaraan WSF hingga tahun 2005 berdampak signifikan terhadap proses WSF. Hal tersebut dapat dilihat dari pergeseran penyelenggaraan WSF dari pertemuan yang diorganisir oleh OC dan IC menjadi pertemuan yang diorganisasi secara mandiri oleh para partisipan (*self-organized*). Beberapa kelompok melihat perubahan ini menandakan fragmentasi di dalam tubuh WSF. Namun, sebagian besar kelompok melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang positif, yang akan lebih memberikan ruang bagi gerakan akar rumput di dalam WSF (Juris, 2006).

Partai Politik

Relasi antara WSF dan partai politik sebenarnya cukup problematis. Jika mengacu pada *Charter of Principles*, WSF membatasi keikutsertaan partai politik dalam penyelenggaraan WSF. Hal tersebut berdasarkan beberapa faktor: pertama, partisipan dan penyelenggara ingin memastikan bahwa kondisi politik domestik di mana WSF diselenggarakan tidak dapat melakukan pembajakan terhadap WSF. Kedua, pembatasan ini merupakan respon terhadap kegagalan partai politik kiri selama abad ke-20 dan asosiasi historis partai-partai sayap kiri yang lekat dengan pemerintahan otoriter dan tidak demokratis. Dan ketiga, partisipan dan penyelenggara WSF ingin menciptakan ruang sosial bagi gerakan-gerakan sosial dan NGO untuk membangun jejaring aktivis tanpa terjebak dalam politik elektoral.

Meskipun terdapat batasan tersebut, tetapi partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal pendanaan dan dukungan organisasional terhadap proses yang mengiringi WSF selama ini. Misalnya *Partido dos Trabalhadores* (PT) yang merupakan tuan rumah pada penyelenggaraan WSF tahun 2002, 2003, 2005, 2009; serta pemerintahan Hugo Chavez juga merupakan

penyelenggara dan tuan rumah WSF tahun 2006 di Caracas. Selain itu, anggota-anggota partai komunis dan sosialis dari berbagai belahan dunia selalu hadir dalam tiap penyelenggaraan WSF. Pada tahun 2004 ketika WSF berlangsung di India, ketika larangan keikutsertaan partai politik dalam proses WSF dicabut, *Communist Party of India (Marxist)/CPI(M)* memainkan peran organisasional yang cukup penting. Partai-partai sayap kiri juga berperan penting dalam penyelenggaraan berbagai forum yang bersifat lokal dan regional. Selain itu, pemerintahan-pemerintahan sosialis di Amerika Latin juga memainkan peranan penting selama proses WSF dan gerakan anti-neoliberalisme.

Keterlibatan partai politik dalam WSF selalu menjadi perdebatan hangat. Tak dapat dimungkiri, partai-partai sayap kiri menempati posisi yang cukup vital dalam gerakan anti-kapitalis global. Dalam beberapa kasus, partai-partai sayap kiri memiliki kapabilitas dalam memobilisasi orang dalam jumlah besar, baik untuk kepentingan elektoral maupun protes terhadap agenda-agenda neoliberal. Benturan antara kelompok anti-hirarki dan partai politik sebenarnya didasari oleh struktur partai yang cenderung hirarkis, sejarah kelim partai sosialis dan komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur, serta keinginan di kalangan aktivis hari ini untuk menciptakan suatu gerakan baru yang bebas dari ortodoksi dan pemusatan kekuasaan. Di satu sisi, sebagian besar partisipan WSF menganggap bahwa negara sebagai entitas yang korup dan tidak representatif, bahkan pemerintahan sayap kiri sekalipun dianggap hanya berupaya mengkooptasi gerakan untuk kepentingan politis mereka. Namun di sisi lain, partisipan WSF menyadari andil dari partai politik yang tak hanya sebatas dukungan terhadap penyelenggaraan WSF, tetapi juga termasuk pengimplementasian kebijakan-kebijakan progresif yang berupaya memajukan agenda-agenda anti-neoliberalisme yang masih satu visi dengan apa yang diperjuangkan oleh WSF.

Proposal dan Tuntutan *World Social Forum*

World Social Forum tidak hanya menyediakan ruang bagi aktor-aktor yang menentang globalisasi neoliberal untuk saling berinteraksi, berkolaborasi dan berjejaring, tetapi yang lebih penting adalah jejaring-jejaring yang terbentuk berkat WSF tersebut bertransformasi menjadi proposal dan tuntutan. Panel, lokakarya, dan seminar yang berlangsung tiap kali penyelenggaraan WSF menghadirkan diskusi, manifesto serta proposal terkait imaji alternatif terhadap globalisasi neoliberal. Meskipun dalam proposal dan manifestonya selama ini sering ditemui beragam

perdebatan –karena sangking kayanya proposal dan tuntutan yang ditawarkan, tetapi setidaknya terdapat titik temu di antara perbedaan-perbedaan tersebut, yang tercermin dalam komitmen bersama untuk membangun kembali demokrasi (*reinventing democracy*) dan perjuangan atas *the common*. Dari proposal dan tuntutan WSF tersebut juga dapat diidentifikasi tahapan strategi *multitude* yang berupa eksodus dan reformisme antagonistik. Sementara strategi politik *multitude* yang berupa perebutan kekuasaan dan hegemoni belum mampu direalisasikan dalam proses WSF.

Eksodus

Strategi eksodus sebagaimana yang dipaparkan oleh Hard & Negri (2017) dapat diidentifikasi di dalam proses serta proposal dan tuntutan WSF. Selama proses penyelenggaraan WSF, lahir suatu bentuk baru partisipasi politik. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari dipilihnya model pengorganisasian politik horizontal yang berupa *open space*. Partisipan WSF melihat bahwa demokrasi representatif bukanlah model yang memadai bagi pengorganisasian politik progresif, sebab demokrasi representatif dianggap hanya akan menguntungkan elit-elit politik.

Sementara dalam proposal WSF, strategi eksodus dapat diidentifikasi di dalam bentuk adopsi kebijakan yang telah dijalankan selama lebih dari dua dekade di Porto Alegre. Mekanisme penganggaran partisipatif mensyaratkan tiap masyarakat untuk mengambil peran dalam merancang penganggaran dana dan menentukan prioritas ekonomi (Santos, 2005: 316). Proposal penganggaran partisipatif ini menjadi krusial karena mampu melampaui dikotomi perdebatan antara pasar vs negara dan privat vs publik. Proses penganggaran partisipatif secara implisit menyiratkan bahwa baik pasar maupun negara harus dikontrol langsung oleh masyarakat luas, sebab baik pasar maupun negara selama ini dianggap tidak dapat memberikan akses terhadap masyarakat untuk memutuskan secara langsung apa yang mereka kehendaki.

Reformisme Antagonistik

Selain menerapkannya dalam tiap penyelenggaraan WSF, proposal mengenai bentuk baru partisipatif yang dimaksud oleh partisipan WSF merupakan model yang telah diterapkan di Kerala, India (Parameswaran, 2015). Bentuk-bentuk baru partisipasi politik berupa pengorganisasian politik yang non-hirarki, pengambilan keputusan yang berdasar konsensus, penganggaran

partisipatif, referendum, serta diikutsertakannya masyarakat sipil dalam tiap pengambilan keputusan.

Model demokrasi partisipatif yang diterapkan di Kerala berangkat dari upaya untuk mengakhiri konsentrasi kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir orang. Sebab, hal tersebut berimplikasi terhadap depolitisasi dan semakin pasifnya masyarakat sipil. Model demokrasi partisipatif yang dikenal dengan People's Campaign for Decentralized Planning ini awalnya diusung oleh Kerala Sastra Sahitya Parishad/KSSP (Heller, 1995). Model tersebut kemudian diadopsi pada tahun 1996 (Williams, 2008: 38). Model tersebut mensyaratkan setiap keputusan politik yang diambil melalui proses yang terdesentralisasi. Proses deliberatif ini ditujukan untuk mendorong partisipasi masyarakat akar rumput. Proses partisipatif juga melibatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan, komunitas adat dan Dalit. Selain itu, model demokrasi partisipatif yang diterapkan di Kerala diharapkan dapat kembali mengintegrasikan politik ke masyarakat.

Proposal terkait model demokrasi partisipatif ini dapat diidentifikasi sebagai strategi reformisme antagonistik (Hardt & Negri, 2017: 276-277). Proses elektoral merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mentransformasi struktur kuasa, seperti pengalaman Kerala di mana *gap* antara rakyat dan elit politik berhasil dipangkas berkat demokrasi partisipatif. Namun, Hardt dan Negri juga menyatakan bahwa reformisme antagonistik memiliki batasan karena kekuatan-kekuatan progresif rawan terkooptasi oleh kedaulatan negara yang bukannya keberhasilan untuk mengubah struktur kuasa di dalam negara melainkan struktur kuasa di dalam negara mendistorsi kekuatan-kekuatan progresif tersebut.

Simpulan

Perlawanan yang dilakukan WSF merupakan eksperimentasi pengorganisasian politik *multitude*. Bentuk pengorganisasian politik WSF yang inklusif dan horizontal berperan sebagai titik *nomad* bagi gerakan-gerakan perlawanan terhadap globalisasi neoliberal. WSF menyediakan ruang bagi gerakan-gerakan perlawanan tersebut untuk berjejaring melawan struktur kuasa yang tunggal pada level politik global. Selanjutnya, jejaring-jejaring yang terbentuk berkat WSF tersebut bertransformasi menjadi proposal dan tuntutan yang dapat dilihat dari panel-panel, lokakarya-lokakarya dan seminar-seminar yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pertukaran ide, manifesto dan proposal kerja.

Perlawanan WSF terhadap globalisasi neoliberal setidaknya dapat dilihat dari tuntutan dan proposal yang selama ini menyeruak mengiringi proses WSF. Proposal dan tuntutan tersebut selaras dengan strategi politik multitude sebagaimana dipaparkan oleh Hardt dan Negri. Namun, apa yang absen dari upaya perlawanan yang dilakukan oleh WSF terhadap globalisasi ialah pengimplementasian tuntutan dan proposal tersebut yang belum berskala global. Sebab, untuk melakukan perlawanan terhadap globalisasi neoliberal, multitude perlu melakukan perlawanan yang berskala global. Strategi eksodus dan reformisme antagonistik yang belum berhasil diterapkan pada skala global menyebabkan upaya strategi perlawanan multitude yang disebut dengan merebut kekuasaan dan hegemoni belum dapat dicapai. Sebab strategi merebut kekuasaan dan hegemoni berbeda dengan strategi eksodus dan reformisme antagonistik. Strategi merebut kekuasaan dan hegemoni mensyaratkan transformasi masyarakat secara langsung dan menyeluruh, dalam skala global.

Referensi

- Brazilian Trade Unionists. (2002, January 31). *Brazilian Unionists Speak out against World Social Forum in (WSF) in Porto Alegre & Civil Society*. Diambil kembali dari A-Infos: <http://www.ainfos.ca/02/jan/ainfos00502.html>
- Byrd, S., & Jasny, L. (2010). Transnational Movement Innovation and Collaboration: Analysis of World Social Forum Networks. *Social Movement Studies*, 355-372.
- Conway, J. (2011). Cosmopolitan or Colonial? The World Social Forum as 'contact zone'. *Third World Quarterly*, 217-236.
- Conway, J., & Singh, J. (2009). Is the World Social Forum a Transnational Public Sphere?: Nancy Fraser, Critical Theory and the Containment of Radical Possibility. *Theory, Culture & Society*, 61-84.
- Della-Porta, D. (2005). Multiple Belongings, Tolerant Identities, and the Construction of Another Politics. Dalam D. Della-Porta, & S. Tarrow, *Transnational Protest and Global Activism* (hal. 175-201). Lanham: Rowman and Littlefield.
- Doerr, N. (2008). Deliberative discussion, language and efficiency in the WSF process. *Mobilization: An International Quarterly*, 395-410.
- Fisher, W., & Ponniah, T. (2015). *Another World is Possible: World Social Forum Proposals for An Alternative Globalization*. London: Zed Books.
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press.
- Funke, P. N. (2012). The Rhizomatic Left and Neoliberal Capitalism: Theoretical Interventions on Contemporary Social Movements in the Global North. *International Critical Thought*, 30-41.
- Gautney, H. (2010). *Protest and Organization in the Alternative Globalization Era: NGOs, Social Movements, and Political Parties*. Basingstoke & New York:: Palgrave Macmillan.

- Glasius, M., & Timms, J. (2006). The Role of Social Forums in Global Civil Society. Dalam M. Glasius, M. Kaldor, & H. Anheier, *Global Civil Society 2005/6* (hal. 190-238). London: Sage Publications.
- Hardt, M. (2005, January). *Autopsy Interview with Michael Hardt*. Diambil kembali dari Generation Online : <https://www.generation-online.org/p/fpnegri15.htm>
- Hardt, M., & Negri, A. (1994). *Labor of Dionysus: A Critique of the State Form*. Minneapolis & London: University of Minnesota Press.
- Hardt, M., & Negri, A. (2000). *Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hardt, M., & Negri, A. (2004). *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. London: Penguin.
- Hardt, M., & Negri, A. (2009). *Commonwealth*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hardt, M., & Negri, A. (2017). *Assembly*. New York: Oxford University Press.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Harvey, D. (2007). *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Heller, P. (1995). Social Capital as Product of Class Mobilization and State Intervention: Industrial Workers in Kerala, India. *World Development*, 1055–1071.
- Houtart, F., & Polet, F. (2001). *The Other Davos*. London: Zed Books.
- Jordan, L. (2004, January 15). *The Ford Foundation and the World Social Forum*. Diambil kembali dari Open Democracy: https://www.opendemocracy.net/en/article_1678jssp/
- Juris, J. (2006, June 7). *Youth and the World Social Forum*. Diambil kembali dari Youth Activism: <http://ya.ssrc.org/transnational/Juris/>
- Juris, J. (2008). Spaces of intentionality: Race, class and horizontality at the United States Social Forum. *Mobilization*, 353–371.
- Klein, N. (2002). *Fences and Windows: Dispatches from the Front Lines of the Globalization Debate*. London: Picador.
- Klein, N. (2003, January 30). *The Hijacking of The WSF*. Diambil kembali dari Naomi Klein: <https://naomiklein.org/hijacking-wsf/>
- Laclau, E., & Chantal, M. (2011). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.
- Leite, J. C. (2005). *The World Social Forum: Strategies of Resistance*. Chicago: Haymarket Books.
- Lorenzano, L. (2000). Zapatismo: Recomposition of Labour, Radical Democracy and Revolutionary Project. Dalam J. Holloway, & E. Pelaez, *Zapatista! Reinventing Revolution in Mexico* (hal. 126-158). London: Pluto Press.
- Parameswaran, M. (2015). Two Opposing Views on the Future of Humankind. Dalam W. Fisher, & T. Ponniah, *Another World is Possible: World Social Forum Proposals for An Alternative Globalization* (hal. 324-328). London: Zed Books.
- Patomaki, H. (2011). Towards global political parties. *Ethics & Global Politics*, 81-102.
- Patomaki, H., & Teivainen, T. (2002). *The Art of The Possible*. Helsinki: Network Institute for Global Democracy.
- Pleyers, G. (2012). A Decade of World Social Forums: Internationalisation without Institutionalisation? Dalam M. Kaldor, H. Moore, & S. Selchow, *Global Civil Society 2012: Ten Years of Critical Reflection* (hal. 166-183). Basingstoke & New York: Palgrave MacMillan.
- Santos, B. d. (2005). Two Democracies, Two Legalities: Participatory Budgeting in Porto Alegre, Brazil. Dalam B. d. Santos, & C. A. Rodríguez-Garavito, *Law and Globalization*

- From Below: Towards a Cosmopolitan Legality* (hal. 310-338). Cambridge: Cambridge University Press.
- Santos, B. d. (2006). *The Rise of the Global Left: the World Social Forum and Beyond*. London: Zed Books.
- Smith, J. (2007). *Global Democracy and World Social Forums*. London: Routledge.
- Smith, J. (2008). *Social Movements for Global Democracy*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Steger, M. (2013). *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Teivainen, T. (2005). The World Social Forum: Arena or Actor? Dalam J. Leatherman, & J. Webber, *Charting Transnational Democracy* (hal. 247-268). New York: Palgrave Macmillan.
- Torney, S. (2005). From utopian worlds to utopian spaces: Reflections on the contemporary radical imaginary and the social forum process. *Ephemera: Theory and Politics in Organisations*, 394–408.
- Wallerstein, I. (2002). New Revolt Against the System. *New Left Review*, 29-39.
- Waterman, P. (2003, June 17). *Open Democracy*. Diambil kembali dari World Social Forum: The Secret of Fire: https://www.opendemocracy.net/en/article_1293jsp/
- Williams, M. (2008). *The Roots of Participatory Democracy: Democratic Communists in South Africa and Kerala, India*. Basingstoke & New York: Palgrave MacMillan.
- Williamson, J. (2002, November 1). *What Washington Means by Policy Reform*. Diambil kembali dari Peterson Institute for International Economics: <https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/what-washington-means-policy-reform>
- World Social Forum. (2015). Charter of Principles. Dalam W. Fisher, & T. Ponniah, *Another World is Possible: World Social Forum Proposals for an Alternative Globalization* (hal. 355-358). London: Zed Books.